



# Warga Miskin Dapat Bantuan Hukum Gratis

## ■ Pemkot Yogya Gandeng 21 LBH dan OBH

**YOGYA, TRIBUN** - Pemkot Yogya kembali mengulirkan program layanan bantuan hukum gratis untuk warga miskin di wilayahnya. Program tersebut diluncurkan dengan menjalin kerja sama dengan 21 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau Organisasi Bantuan Hukum (OBH).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Yogyakarta, Aman Yuriadjaya, mengungkapkan, layanan bantuan hukum gratis ini telah dimulai sejak 2022. Langkah itu, merupakan bentuk afirmasi bagi warga Kota Yogyakarta, terutama dari kalangan miskin, untuk mendapatkan kepastian hukum.

"Sudah masuk tahun ke tiga. Kami konsisten untuk memberikan bantuan hukum pada masyarakat miskin di Kota Yogya dalam bentuk pendampingan," katanya, Rabu (24/1).

Aman berharap warga bisa melek dan paham soal hukum. "Baik di kategori litigasi maupun non litigasi. Jadi, lengkap, semuanya kami berikan, dengan harapan masyarakat melek dan paham soal hukum," tambah Aman.

Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta Rihari Wulandari, menambahkan, layanan tersebut menjadi bagian dari pemenuhan HAM, kaitannya dengan akses terhadap keadilan dan kesamaan kedudukan di hadapan hukum. Sejak tahun pertama dan masuk tahun ketiga ini, anggaran bantuan hukum untuk masyarakat miskin telah dialokasikan Rp264 juta.

"Anggaran yang terserap di 2022 sebesar 40,15 persen, lalu tahun 2023 sebesar 53,41 persen, dari dana reimburse perkara yang ber-

### PENDAMPINGAN

- Pemkot Yogya gulirkan program layanan bantuan hukum gratis untuk warga miskin di wilayahnya.
- Ada 21 LBH atau Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang digandeng.
- Layanan bantuan hukum gratis ini telah dimulai sejak 2022.
- Langkah ini agar warga miskin mendapatkan kepastian hukum.

asal dari BTT (Belanja Tidak Terduga)," jelasnya.

Ia pun berharap, tahun ini serapan anggaran bisa lebih baik, karena mekanisme *reimburse* yang sebelumnya dibatasi dengan pagu anggaran per LBH atau OBH, sekarang secara umum lebih terbuka. Sehingga, anggaran yang telah disiapkan tersebut dapat digunakan secara optimal dalam memberikan pelayanan dan perlindungan hukum bagi masyarakat Kota Yogyakarta.

Sementara, alokasi anggaran di kategori non litigasi tahun ini difokuskan untuk sosialisasi atau penyuluhan ke level akar rumput. Bukan tanpa alasan, dari hasil evaluasi di dua tahun sebelumnya, masih banyak masyarakat yang belum paham dengan apa yang harus dilakukan, ketika mendapatkan permasalahan hukum.

"Masih banyak yang belum paham, saat mendapat permasalahan hukum, harus bagaimana. Mungkin, itu karena takut soal biaya dan lain sebagainya," ung-

kapnya.

Direktur LBH Tentrem, salah satu LBH yang bekerja sama dengan Pemkot Yogyakarta, Yahya Asmuni, menandakan, tidak semua kasus bisa tertangani dalam program ini. Dalam artian, ada beberapa perkara yang tidak dapat diajukan oleh masyarakat, untuk difasilitasi layanan bantuan hukum gratis tersebut.

"Seperti makar, kekerasan seksual, psikotropika dan zat adiktif atau narkoba. Lalu, tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia, terorisme, korupsi, dan pencucian uang," ujarnya.

Secara garis besar, ia pun mengapresiasi konsistensi politik anggaran Pemkot Yogyakarta dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Dirinya mencatat, sepanjang 2023 lalu, terdapat 55 perkara yang ditangani lewat program bantuan hukum tersebut, yang didominasi oleh kasus perdata.

"Masyarakat yang ingin mengakses layanan bantuan hukum ini tidak dipungut biaya, dengan syarat dia masuk dalam kategori tidak mampu, yang terdapat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial," ujarnya.

Untuk mengakses bantuan hukum gratis tersebut, masyarakat bisa menyambangi Kantor Bagian Hukum Setda Kota Yogya, atau langsung ke salah satu LBH maupun OBH yang telah bekerja sama. Antara lain, LBH Senopati, LK3 Sekar Melati, LBH Dharma Yudha, LSBH FSH UIN, PKBH FH UIL, PKBH FH UMY, YLPA DIY, LBH Al Kautsar, PBHI Yogyakarta, LBH Harapan, YLBH Sikap, hingga LBH Sekawan. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005